

# COLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PERCEPATAN PENURUNAN RABIES DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Gundisalvus Allesandro Dey Putra  
NPP. 31.0781  
Asdaf Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Program Studi Kebijakan Publik  
Email: [Sandrodeyputra@gmail.com](mailto:Sandrodeyputra@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Merintha Suryapusita, S.Ap., M.KP

## ABSTRACT

**Problem/Background (GAP):** There were rabies cases found in 6 villages in TTS Regency in mid-2023 and experienced an increase until the end of 2023 up to 6.5 times, this was followed by uneven budget and vaccine allocation to villages. villages infected with this virus. **Purpose:** to describe and analyze collaboration between the government as a stakeholder and related parties in order to accelerate the reduction of Rabies in South Central Timor Regency, NTT Province. **Method:** This research method uses qualitative research to explain the problems that occur in more depth based on collaborative theory. governance from (Ratner, 2012) through data collection techniques in the form of direct and online interviews, observation and documentation. **Results/Findings:** Collaboration carried out by the government and related parties such as the health service, NGOs and other parties has gone well although not completely optimal, where based on Ratnar's theory it can be seen that the collaboration that has been carried out with various kinds of programs is only However, there are still obstacles in the form of funding and some of the infected villages are still difficult to reach, while the results have been seen through various cross-sector programs that have been held by making mass vaccines and controlling virus-carrying animals as well as direct outreach to the community. **Conclusion:** Collaboration in handling Rabies in TTS Regency shows a positive first step in facing the complex challenges of this zoonotic disease, only more comprehensive steps are needed to optimize the efforts that have been made.

**Keywords:** Government Collaboration, Rabies, Infectious Diseases

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Ditemukan adanya kasus rabies pada 6 desa di Kabupaten TTS pada pertengahan tahun 2023 dan mengalami peningkatan hingga akhir tahun 2023 hingga 6,5 kali lipat, hal ini diikuti dengan anggaran dan alokasi vaksin yang belum merata ke desa-desa yang terjangkit virus ini. **Tujuan:** untuk mendeskripsikan dan menganalisis kolaborasi pemerintah sebagai pemangku kepentingan dengan pihak-pihak terkait dalam rangka percepatan penurunan Rabies di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi NTT. **Metode:** Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif untuk dapat menjelaskan permasalahan yang terjadi dengan lebih mendalam berdasarkan teori *collaborative governance* dari (Ratner, 2012) melalui teknik pengambilan data berupa wawancara langsung maupun daring, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak-pihak yang terkait seperti dinas kesehatan, LSM, dan pihak-pihak lainnya telah berjalan dengan baik walaupun belum sepenuhnya optimal, dimana berdasarkan teori Ratnar dilihat bahwa kolaborasi yang telah dilakukan dengan berbagai macam program hanya saja masih terdapat kendala berupa anggaran

pembiayaan dan desa-desa terjangkau masih ada yang sulit untuk dijangkau, adapun hasil capaian sudah terlihat dengan berbagai program lintas sektor yang telah diadakan dengan membuat vaksin massal dan pengendalian hewan pembawa virus serta adanya sosialisasi langsung ke masyarakat. **Kesimpulan:** Kolaborasi dalam penanganan Rabies di Kabupaten TTS menunjukkan langkah awal yang positif dalam menghadapi tantangan kompleks penyakit zoonosis ini, hanya perlu adanya langkah-langkah yang lebih komprehensif untuk dapat mengoptimalkan upaya-upaya yang telah dilakukan.

**Kata Kunci:** Kolaborasi Pemerintah, Rabies, Penyakit Menular

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rabies merupakan jenis virus yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi mamalia, termasuk manusia sehingga dapat menimbulkan penyakit serius apabila terjangkau. Virus ini menyerang sistem saraf pusat dan umumnya ditularkan melalui gigitan atau melalui luka yang terkena air liur dari hewan yang terinfeksi sehingga menyebabkan gangguan neurologis yang bersifat fatal jika tidak mendapat pengobatan segera setelah tanda-tanda gejalanya muncul (Jackson, 2013). Rabies juga merupakan salah satu penyakit yang terabaikan dimana sebagian besar menyerang kelompok masyarakat yang terpinggirkan, berekonomi rendah dan rentan sehingga pemerintah perlunya perhatian khusus dari pemerintah untuk menangani permasalahan ini (Reiss et al., 2018).

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan RI diketahui bahwa jumlah kasus rabies didalam negeri mencapai 104.229 dimana menunjukkan kenaikan sebesar 82,04% dari tahun sebelumnya yang hanya mencatat 57.257 kasus. Selain itu, terdapat 102 kasus kematian akibat Rabies pada tahun 2022 dimana mengalami peningkatan sebesar 64,52% jika dibandingkan dengan 2021 yang hanya terdapat 62 kasus kematian sehingga dari data diatas membuktikan bahwa penyakit Rabies ini menjadi penyakit yang perlu penanganan yang sangat serius. Adapun beberapa provinsi seperti, Bali, NTT, Sulawesi selatan dan, Kalimantan barat merupakan provinsi-provinsi yang angka kasus rabiesnya masih tergolong tinggi dan perlu ditangani secara serius oleh pemerintah dengan melaksanakan berbagai kebijakan untuk mengurangi penyebaran virus tersebut.

Adapun kolaborasi pemerintah dibutuhkan sebagai sebuah proses dan struktur dalam manajemen serta perumusan kebijakan publik yang melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai tingkatan dan sektor, termasuk pemerintah, instansi publik, sektor swasta, dan masyarakat sipil (Emerson et al., 2012).

### **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi dengan tingkat kasus Rabies terbanyak di Indonesia setelah provinsi Bali. Adapun di NTT sendiri, kabupaten dengan jumlah kasus terbanyak adalah Kabupaten TTS (Timor Tengah Selatan) dimana pada bulan juni tahun 2023, pemerintah Kabupaten TTS menetapkan status keadaan luar biasa (KLB) karena semakin meningkatnya kasus Rabies di kabupaten tersebut. Adapun hingga saat ini ada 46 kasus Rabies yang tersebar di enam kecamatan, antara lain: 1) Kecamatan Amanatun Selatan; 2) Kecamatan Nunkolo; 3) Kecamatan Kie; 4) Kecamatan Kuantana; 5) Kecamatan Kolbano; dan 5) Kecamatan Fautmolo.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten TTS menyatakan bahwa kasus Rabies di kabupaten tersebut mengalami lonjakan yang sangat tinggi hingga 6,5 kali lipat, dimana diketahui pada tanggal 31 Mei 2023 terdapat 72 kasus yang dilaporkan dan terjadi pada 21 desa, namun satu bulan setelahnya jumlah kasus rabies melonjak hingga 544 kasus dan terjadi pada 144 desa, adapun

alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) melalui Dinas Peternakan NTT telah disediakan sebanyak 17.500 dosis vaksin dan sejauh ini 6.000 dosis vaksin sudah didistribusikan ke wilayah TTS.

Pemerintah Kabupaten TTS menerapkan tujuh langkah untuk pengendalian Rabies salah satunya yaitu memberikan vaksinasi rabies kepada hewan-hewan peliharaan masyarakat yang masih sehat serta melakukan eliminasi selektif kepada hewan penular rabies yang bergejala rabies, namun fakta yang terjadi bahwasannya jumlah vaksin tidak mencukupi untuk kasus dan banyaknya anjing yang terjangkit virus Rabies ini. Untuk itu, diharapkan adanya *Collaborative governance* dalam percepatan penurunan Rabies di kabupaten TTS dilakukan dengan melibatkan berbagai perangkat pemerintahan dari pusat hingga ke desa-desa sehingga dengan proses kerja sama ini dapat mempercepat penanganan kasus rabies yang terjadi di kabupaten ini.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang memiliki konsep yang sama terkait dengan kolaborasi pemerintah dalam penanganan kasus rabies. Penelitian pertama (Manro & Yovani, 2018) menggunakan perspektif NIES dari Victor Nee (2003) yaitu market mechanism: state regulation, collective action, monitoring; enforcement, dan decoupling: compliance dimana penelitian ini meneliti tentang strategi nasional eliminasi rabies agar lebih menginklusikan aspek kesehatan dan kesejahteraan hewan untuk menyokong peningkatan kesehatan masyarakat di Bali agar penanganan kasus dapat lebih terkontrol. Penelitian kedua (Mutiarawati & Sudarmo, 2021) menggunakan teori dari De Seve yang terdiri dari delapan faktor pengukur keberhasilan kolaborasi dalam governance adapun tujuan kolaborasi pemerintah untuk menyelesaikan pasang surut banjir di Kelurahan Bandengan, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang dilakukan belum optimal dan masih dibutuhkan reformasi dengan mensinergikan berbagai perspektif pemangku kepentingan, lebih dekat dengan masyarakat, dan memperluas kerjasama dengan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan sumber daya, dan perekrutan SDM. Penelitian Ketiga (Ismadi, 2020) mendeskripsikan penilaian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tentang implementasi otoritas veteriner dalam kebijakan penanggulangan rabies adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa etelah dilakukan skoring, hasil data kuantitatif didapatkan bahwa Dinas Keswan/Kesmavet tentang penilaian otovet adalah 4 OPD memberi penilaian baik dan 5 OPD buruk. Dinas Kesehatan 4 OPD memberi penilaian baik dan 5 OPD buruk. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4 OPD memberi penilaian baik dan 5 OPD buruk. Badan Kepegawaian Daerah 1 OPD memberi penilaian baik dan 8 OPD buruk. Penelitian Keempat (Subrata et al., 2020) menjelaskan pendekatan one health yang berkolaborasi antara kesehatan manusia, hewan dan lingkungan yang bertujuan untuk mengetahui tantangan program, peranan pemangku kepentingan dalam pengendalian rabies dan upaya pendekatan one health yang terintegrasi, adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan dalam pelaksanaan program pada sistem pendataan masih kurang, vaksinasi anjing belum optimal, cara memelihara anjing yang masih diliaran, program kontrol populasi, manajemen kasus gigitan anjing belum terpadu, edukasi masih rendah, partisipasi masyarakat yang rendah sehingga perlunya peranan dari semua pemangku kepentingan untuk pengendalian rabies, salah satunya melalui pendekatan one health yang terintegrasi dilaksanakan kegiatan yang berkolaborasi dalam surveilan epidemiologi, manajemen kasus gigitan terpadu, manajemen hewan penular rabies dan faktor sosial-budaya-ekologi lingkungan. Dan penelitian Kelima (Putri & Setiyono, 2020) menjelaskan kolaborasi pemerintah dan masyarakat untuk menanggulangi rabies melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rabies kepada masyarakat, adapun bertujuan

mengedukasi masyarakat tentang bahaya rabies dan langkah penanganan apabila masyarakat tergigit hewan penular rabies (HPR). Kegiatan KIE Rabies di Kota Padang dilakukan melalui komunikasi dua arah dengan bantuan poster, games board Rabies, dan buku pengetahuan zoonosis. Kegiatan ini diikuti oleh 1471 peserta dari berbagai kalangan profesi di Kota Padang. Melalui kegiatan ini, masyarakat mendapatkan informasi mengenai bahaya rabies, ciri-ciri hewan yang terjangkit rabies, cara penularan rabies, dan langkah-langkah penanganan apabila tergigit HPR.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Mutiarawati & Sudarmo, 2021), dimana secara konsep penelitian memiliki kesamaan yaitu membahas terkait dengan kolaborasi pemerintah dalam penanggulangan kejadian luar biasa yang terjadi di masyarakat, namun perbedaan terletak pada kasus yang diteliti. Pada penelitian sebelumnya memfokuskan masalah pada kolaborasi pemerintah dalam penanganan banjir sedangkan pada penelitian ini memfokuskan pada penyakit rabies. Adapun lokasi yang digunakan untuk melakukan penelitian yang dilakukan berbeda, yang sebelumnya pada kelurahan Bandengan Kota Pekalongan sedangkan pada penelitian ini di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kolaborasi pemerintah sebagai pemangku kepentingan dengan pihak-pihak terkait dalam rangka percepatan penurunan Rabies di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi NTT .

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif guna mendapatkan data yang lebih lengkap, mendalam, kredibel, dan bermakna sehingga mampu menjelaskan kolaborasi pemerintah Kabupaten TTS dalam rangka percepatan penurunan kasus rabies (Simangunsong, 2017). Adapun peneliti bertindak selaku instrumen utama untuk meneliti sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai, dimana hal ini sesuai dengan kalimat “*Research as key instrument*” (Cresswell, 2016) sehingga peneliti berfungsi menetapkan fokus penelitian, menyiapkan dan memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, serta membuat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian (Moleong, 2017).

Penulis pengumpulan data melalui proses wawancara secara langsung maupun tidak langsung. Wawancara langsung dilakukan kepada unsur penyelenggara pemerintahan yang berkaitan langsung dengan penelitian tanpa melalui perantara, sedangkan wawancara tidak langsung dilakukan pada informan yang tidak mudah untuk ditemui sehingga harus menggunakan perantara (Arifin, 2012). Adapun teknik pemilihan informan yaitu *purposive-sampling* dimana teknik ini mengarah pada pemilihan informan dengan kriteria yang sesuai dengan penelitian ini sehingga mampu memberikan informasi yang terbaik agar mampu mencapai tujuan penelitian yang ingin didapat (Sugiyono, 2015).

Teknik analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data dengan mengolah data-data mentah yang didapatkan dalam bentuk tabel dan gambar, lalu hasil analisis disajikan berupa tabel maupun gambar yang dijelaskan secara deskriptif, dan penarikan kesimpulan yaitu optimalnya kolaborasi pemerintah dalam mempercepat penanggulangan penyakit rabies di Kabupaten TTS (Creswell, 2013).

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada tujuan penelitian yang pertama untuk menjelaskan kolaborasi yang dilakukan antar pemerintah daerah dan organisasi-organisasi terkait dalam rangka mempercepat penanggulangan kasus rabies di Kabupaten TTS, selanjutnya pada tujuan penelitian yang kedua mengidentifikasi kolaborasi pemerintah terkait hambatan dan peluang serta hasil dan capaian penanggulangan kasus rabies di kabupaten TTS menggunakan teori dari (Ratner, 2012).

#### **3.1 Penyelenggaraan Kolaborasi Antara Dinas Kesehatan dan Dinas Peternakan**

Dalam pelaksanaan kerjasama antara Dinas Peternakan dan Dinas Kesehatan di Kabupaten TTS dilakukan melalui pendekatan lintas sektor yang menyeluruh dimana kedua dinas berkolaborasi dalam berbagai aspek, mulai dari pemantauan populasi anjing liar, pelaksanaan program vaksinasi massal, hingga penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan menjauhi hewan yang berpotensi membawa penyakit. Selain itu, kerjasama ini juga melibatkan pertukaran informasi dan data yang relevan, serta penyediaan sumber daya dan fasilitas untuk mendukung kegiatan penanganan dan pencegahan Rabies secara efisien.

#### **3.2 Pelaksanaan Kolaborasi Pemerintah Dalam Penurunan Kasus Rabies Di Kabupaten TTS**

##### **1. Identifikasi Hambatan dan Peluang**

- 1) Masalah, munculnya kasus Rabies pada kabupaten TTS diawali terjadinya gigitan anjing yang mengakibatkan meninggalnya salah satu masyarakat di desa Fenun Kecamatan Amanatun Selatan, sehingga pada tahun 2023 tim dari dinas kesehatan hewan bersama dokter puskesmas dan petugas kesehatan melakukan pemantauan dan observasi di lapangan. Dari hasil pemantauan dan observasi di lapangan ditemukan bahwa adanya satu ekor anjing yang terkapar di lokasi korban meninggal sehingga anjing tersebut dibawa ke Kota Soe dengan tujuan dilakukan pengambilan sampel otak dan selanjutnya dikirim ke balai besar detainer di Kota Denpasar untuk dilakukan uji laboratorium dan pemantauan lanjutan atas kasus dugaan Rabies. Namun, nyatanya penyebaran virus ini terus mengalami lonjakan yang drastic dimana total kasus menjadi 21 kasus gigitan anjing dengan rincian di desa Fenun 19 terjadi kasus gigitan dan di desa Fatu Lunu 2 kasus. dan akhirnya terjadinya penyebaran kasus Rabies di beberapa Kecamatan maupun Desa di Kabupaten TTS yang mengakibatkan banyak nya korban yang dirawat di rumah sakit yang bertambah hingga sekarang.
- 2) Aktor, adapun dalam percepatan penurunan angka kasus Rabies juga membutuhkan beberapa aktor yang diharapkan dapat berperan aktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya, antara lain:
  - Dinas Kesehatan, dengan fungsi dan tugas yang mencakup pencegahan, pengawasan epidemiologi, penyuluhan dan edukasi masyarakat, penanganan kasus rabies, serta kolaborasi dengan instansi terkait
  - Dinas Peternakan, dengan fokus pada kontrol populasi hewan, vaksinasi, dan pengendalian penyebaran penyakit. Peran utamanya termasuk mengawasi populasi anjing, termasuk hewan liar dan peliharaan, untuk memastikan bahwa mereka divaksinasi secara teratur dan steril
  - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), melakukan advokasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya rabies melalui tindakan pencegahan yang tepat, mendukung pendanaan dan sumber daya untuk program vaksinasi hewan peliharaan dan

sterilisasi anjing liar, mengorganisir program pendidikan dan pelatihan tentang tanda-tanda Rabies dan cara merespons paparan rabies, serta memfasilitasi pengumpulan data epidemiologi dan pemantauan kasus Rabies di wilayah tertentu

## **2. Hasil dan Pencapaian**

Pada upaya kolaborasi pemerintah dalam menanggulangi kasus rabies ini masih ditemukan kendala yaitu kurangnya anggaran dan sumber daya dalam pelaksanaan program vaksinasi massal dan kampanye penyuluhan kepada masyarakat. Selain itu, pihak-pihak terkait juga masih menghadapi tantangan dalam menjangkau masyarakat pedesaan yang sulit diakses sehingga penyaluran vaksinasi hewan menjadi tidak merata, adapun hal ini disertai dengan populasi anjing yang kian bertambah di wilayah tersebut terutama anjing liar yang tidak terawat dengan baik sehingga dapat meningkatkan risiko penyebaran rabies. Sehingga meskipun telah dilakukan kerja sama dengan berbagai pihak terkait seperti Dinas Peternakan, LSM, dan pemerintah daerah namun hingga saat ini masih belum terlihat hasil yang signifikan dalam penanggulangan Rabies di Kabupaten ini karena masalah populasi anjing yang terus meningkat meskipun telah dilakukan upaya sterilisasi dan vaksinasi massal.

## **3. Merencanakan Tindakan Collaborative**

- 1) Kolaborasi, kolaborasi antar berbagai pihak menjadi kunci dalam upaya penanganan rabies. Kolaborasi tersebut melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan, pemerintah daerah, LSM, serta masyarakat secara keseluruhan.
- 2) Kemajuan dalam kolaborasi, kolaborasi lintas-sektoral dalam penanganan rabies termasuk kolaborasi dengan Dinas Peternakan dan instansi lainnya. Kami telah berusaha untuk bekerja sama dengan Dinas Peternakan dalam menyelenggarakan program-program penanganan rabies, seperti vaksinasi hewan dan sterilisasi anjing liar.
- 3) Langkah pertama dalam kolaborasi, mengadakan serangkaian pertemuan lintas-sektoral yang melibatkan berbagai pihak terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan, pemerintah daerah, LSM, akademisi, dan komunitas lokal dengan bertujuan untuk mendiskusikan secara komprehensif permasalahan terkait rabies, mengevaluasi langkah-langkah yang telah dilakukan sebelumnya, serta menyamakan pemahaman dan persepsi tentang urgensi dan kompleksitas penanganan rabies.

### **3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penyakit rabies merupakan masalah kesehatan yang sangat memerlukan perhatian khusus dari pemerintah karena memiliki tingkat penyebaran yang sangat tinggi, tidak saja pemerintah daerah namun perlunya kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki konsentrasi yang sama. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa penelitian yang dilakukan (Mutiarawati & Sudarmo, 2021) menjabarkan bahwa kolaborasi pemerintah untuk menyelesaikan pasang surut banjir di Kelurahan Bandengan belum optimal dan masih dibutuhkan reformasi dengan mensinergikan berbagai perspektif pemangku kepentingan, lebih dekat dengan masyarakat, dan memperluas kerjasama. Namun pada penelitian ini ditemukan bahwa melalui kolaborasi pemerintah sudah cukup memberikan dampak yang positif walaupun belum optimal, hal ini dikarenakan pemerintah tidak bergerak sendiri namun berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait untuk dapat melakukan penanganan kasus rabies melalui berbagai program kerja serta dibantu adanya keikutsertaan dari masyarakat.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan serta berdasarkan analisis terkait data-data yang didapatkan melalui wawancara, observasi, maupun dokumen-dokumen terkait dengan *collaborative governance* dalam percepatan penurunan rabies di Kabupaten TTS maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kolaborasi dalam penanganan Rabies di Kabupaten TTS menunjukkan langkah awal yang positif dalam menghadapi tantangan kompleks penyakit zoonosis ini. Melalui pertemuan lintas-sektoral dan pembentukan tim koordinasi gabungan, berbagai pihak terkait telah berupaya menyusun rencana aksi bersama yang terstruktur dan komprehensif.
2. Langkah-langkah konkret seperti vaksinasi massal hewan, pengendalian populasi anjing, dan penyuluhan masyarakat telah diidentifikasi sebagai prioritas dalam rencana tersebut. Meskipun demikian, tantangan-tantangan seperti perbedaan prioritas dan alokasi anggaran antarinstansi, serta kurangnya komunikasi dan koordinasi yang efektif masih menjadi kendala dalam pelaksanaan kolaborasi ini.

**Keterbatasan Penelitian:** Dalam penelitian ini tentunya memiliki keterbatasan yang lebih condong kepada waktu penelitian yang sangat singkat yaitu dua minggu dengan jangkauan tempat penelitian yang jauh dari domisili tempat tinggal peneliti, hal ini dilakukan untuk dapat melakukan observasi langsung pada desa-desa yang memiliki tingkat kasus rabies paling tinggi sehingga menyebabkan observasi maupun wawancara yang dilakukan belum maksimal dan harus dibantu dengan perantara media komunikasi (*handphone*) untuk mendapatkan informasi.

**Arah Masa Depan Penelitian (Future Work):** Penulis menyadari bahwa upaya dari pemerintah daerah TTS untuk melakukan penanganan rabies ini masih belum sepenuhnya optimal sehingga perlunya adopsi pendekatan lintas-sektoral dan *One Health* dalam penanganan rabies, dengan mengintegrasikan perspektif kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan secara komprehensif. Serta menyoroti kebutuhan akan dukungan dan partisipasi aktif dari semua pihak terkait, termasuk pemerintah, swasta, LSM, akademisi, dan masyarakat, untuk mencapai hasil yang optimal dalam penanganan rabies.

#### V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih ditunjukkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan beserta jajarannya yang telah mendukung penulis dengan memberikan ruang untuk melaksanakan penelitian sehingga penelitian berjalan dengan baik.

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2012). *Penelitian Pendidikan*. PT. Rosdakarya.
- Cresswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Pustaka Belajar.
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yayasan Mitra Netra Pustaka Pelajar.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Ismadi, J. (2020). Penilaian Organisasi Perangkat Daerah (Opd) Tentang Otoritas Veteriner Dalam Kebijakan Penanggulangan Rabies Di Provinsi Banten. *Jurnal Sain Veteriner*, 38(1), 45.

- <https://doi.org/10.22146/jsv.42644>
- Jackson, A. C. (2013). Current and future approaches to the therapy of human rabies. *Antirival Research*, 99(1), 61–67. <https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2013.01.003>
- Manro, N. M., & Yovani, N. (2018). Menuju Indonesia Bebas Rabies 2020: Problem Institusi dalam Implementasi Kebijakan Kesehatan Publik di Bali. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI*, 7(4), 168–177. <https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/40619>
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif* (36th ed.). PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Mutiawati, T., & Sudarmo, S. (2021). Collaborative Governance dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan. *Wacana Publik*, 1(1), 82. <https://doi.org/10.20961/wp.v1i1.50892>
- Putri, S. R., & Setiyono, A. (2020). Pengendalian penyakit rabies melalui media komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat di kota padang. *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat*, 2(2), 182–186.
- Ratner, B. D. (2012). *Collaborative governance assessment Item Type monograph*. <http://hdl.handle.net/1834/27215>
- Reiss, D. R., Weithorn, L. A., Burris, S., Littmann, J., Viens, A. M., Hanrahan, D., DeCoster, B., & Campo-Engelsten, L. (2018). Infectious disease prevention and control. *Public Health Law and Ethics: A Reader, Third Edition*, 409–455. <https://doi.org/10.4135/9781452276250.n136>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintah*. ALFABETA.
- Subrata, M., Purnama, S. G., Utami, A., Karang Agustina, K., & Swacita, I. (2020). Peranan Pemangku Kepentingan Dalam Pengendalian Rabies Dengan Pendekatan One Health Terintegrasi Di Bali. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI*, 09(01), 20–32. <https://journal.ugm.ac.id/jkki/article/view/54246>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. ALFABETA.

